

ULAMA JAWA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

*Ahmad Adaby Darban**

ABSTRAK

Ulama Jawa di samping berperan sebagai pemuka agama Islam juga memiliki fungsi sebagai *informal leaders*, dan juga sebagai *key person* dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan Kolonial Belanda. Fungsi itu berlaku karena sebagai besar masyarakat adalah pemeluk Islam, dan kehidupan ulama sebagai *religious elite* dekat dengan rakyat (merakyat).

Keberpihakan kaum birokrat tradisional kepada pemerintah kolonial menyebabkan masyarakat mencari kepemimpinan baru yaitu para ulama sebagai pengayom dan pemuka dalam perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Kata kunci : ulama Jawa - sejarah - *key person*

PENGANTAR

Ulama atau lebih dikenal dengan kyai, di Jawa sebagai pemuka agama Islam yang dalam dirinya memiliki otoritas kharismatik, karena ketinggian ilmu agamanya, kesalehannya dan kepemimpinannya. Biasanya ulama dijadikan *Uswatun khasanah*, atau contoh panutan yang baik di dalam lingkungan masyarakatnya. Oleh masyarakat, ulama diberi tempat sebagai penasihat, sebagai guru (*ustadz*), dan sebagai konsultan kehidupan baik kehidupan rohani maupun duniawi. Di samping itu, ulama sering juga diangkat sebagai pemimpin politik dan pergerakan oleh masyarakat karena dekat dan merakyat.

Dalam lingkungan masyarakat agraris terdapat hubungan yang erat antara masyarakat dengan para ulama. Hal ini terjadi karena para ulama biasanya memiliki identitas yang sama dengan rakyat, yaitu sebagai petani.¹ Dengan demikian, komunikasi dengan rakyat pedesaan menjadi akrab, tanpa

tata cara feodal. Di samping itu, ulama juga memiliki otoritas karismatik sebagai elite religius, yang punya pengaruh besar di kalangan rakyat serta sebagai *key person* masyarakat desanya.²

Dengan demikian, pembicaraan ulama di Jawa dalam perspektif sejarah dianggap penting untuk melihat seberapa jauh peran dan kedudukan para ulama dalam panggung sejarah. Oleh karena itu, pembicaraan ini berusaha mengungkap status para ulama dan peranannya dalam sejarah Indonesia, tidak hanya terbatas sebagai penyebar agama Islam, tetapi juga dalam bidang politik dan sosial.

NILAI ULAMA

Di dalam Islam, ulama itu memiliki nilai sebagai *Warosatul Anbiya'*, sebagai pewaris para nabi. "Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham (harta), tetapi para nabi mewariskan risalah (ilmu dan

* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

agama).” (H.R. Abu Dawud dari Tirmidzi). Diharapkan hidupnya seperti halnya para nabi yang telah lalu, sebagai penyampai risalah, penyebar dan pemelihara ajaran agama Islam, memimpin umat dan berani ber *amar ma'ruf nahi munkar*, memperbaiki dan meluruskan yang salah. Oleh karena itu, ulama tidak hanya sekedar mempunyai sebutan *Al Mukarom* atau yang mulia, tetapi juga harus berani berjuang menegakkan ajaran Islam dan mengayomi umat/rakyatnya, meskipun risiko penjara dan nyawa harus dikorbankan. Seperti halnya Nabi Muhammad saw., berani menanggung risiko dikucilkan, disiksa, difitnah dianggap gila, dan sebagainya. Ia juga ditawari iming-iming wanita, harta, dan tahta, asal mau meninggalkan prinsipnya menyebarkan Islam, tetapi nabi menolak demi mempertahankan kebenaran agamanya. Di samping itu, nabi lebih berani menjalani risiko pahit dalam perjuangannya.³

Begitulah nilai hakiki seorang ulama. Oleh karena itu, ulama yang ideal adalah ulama yang masih mempertahankan dirinya sebagai *Warosatul Anbiya'*, pewaris para nabi. Dengan demikian, ulama yang sesungguhnya akan selalu berpihak kepada kebenaran berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah nabi, membela kaum yang lemah, kaum yang ditindas atau dizalimi, meskipun risiko pahit menyimpannya.⁴ Selain itu para ulama juga dapat bekerja sama baik dengan aparat pemerintah, maupun dengan sultan, sunan dan sebagainya, asalkan pihak aparat pemerintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengayomi rakyatnya dengan baik. Biasanya para ulama diberi tempat khusus sebagai penasihat raja/sultan dan berfungsi pula pada upacara keagamaan.

Meskipun idealnya ulama itu sebagai pewaris nabi, perlu diperhatikan bahwa ulama itu bukan nabi. Ulama tidak memiliki sifat *makshum*, sebagaimana utusan Allah SWT. yang dijaga-Nya. Oleh karena itu, kehidupannya juga memiliki keterbatasan, misalnya sering tergoda oleh kemilaunya materi dan ambisi. Dengan demikian, dapat dipahami, apabila ada orang yang sudah dikenal sebagai ulama, kemudian tindakan dalam hidup-

nya berubah, hanya karena pengaruh materi dan ambisinya. Ulama semacam ini biasanya akan menyimpang jauh dari nilai keulamaannya dan biasanya akan membingungkan dan merusak umat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, nama bagi ulama yang menyimpang dari nilai keulamaannya, disebut *ulama 'usu'*, atau ulama yang sudah rusak,⁵ dalam bahasa sekarang lebih halus disebut sebagai “mantan Ulama”.

ULAMA PADA AWAL PENGEMBANGAN ISLAM DI JAWA

Ulama pengembang Islam di Jawa dinamai para Wali. Oleh karena jumlahnya sembilan, dinamai *wali sanga*. Termasuk dalam wali sanga itu ialah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, dan Sunan Drajat. Meskipun para sunan itu tidak hidup sezaman, secara berkesinambungan mereka menanamkan Islam di hati rakyat tanah Jawa ini. Dalam penyebaran Islam mereka menggunakan pendekatan sinkretis dan juga akulturatif, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang dan lembaga-lembaga budaya yang telah ada kemudian diisi dengan ajaran Islam sehingga mudah dicerna dan sampai pada masyarakat awam.⁶

Model da'wah semacam ini ialah *sekaten* (*Syahadatain*), yang lahir di desa Glagah Wangi Demak. *Sekaten* merupakan gamelan yang gendingnya dicipta oleh Sunan Kalijaga dengan nafas Islami, seperti *Rabulngalamina*, *Salatun*, *Solawatan* dan sebagainya. Gamelan Sekaten merupakan da'wah melalui kesenian.⁷

Di samping *sekaten* juga dipakai lambang ketan, kolak, apem. Makanan ini dibuat dan diedarkan setiap bulan Ruwah (Sya'ban). Secara etimologis, ketan berasal dari kata *Khotoan* yang berarti kelemahan/kesalahan, kolak dari kata *qola* (mengucapkan), dan apem dari kata *afuwun* (mohon ampun). Dengan demikian, makna ketan, kolak, dan apem secara keseluruhan adalah bila merasa bersalah cepat-cepatlah berkata mohon ampun.⁸ Da'wah menggunakan lambang-lambang budaya ini masih banyak lagi jenisnya.

Penyebaran agama Islam selanjutnya dilakukan melalui lembaga pendidikan yang dikenal sebagai *pondok*. Pendidikan *pondok* dimulai oleh Sunan Ampel di Surabaya, dengan sistem satu kompleks terdiri atas masjid, keluarga kyai, tempat pendidikan, dan tempat tinggal santri.⁹ Melalui pendidikan *pondok pesantren*, penghayatan dan pengalaman serta pengetahuan Islam lebih mendalam dan *intensif*. Di samping itu *pondok pesantren* juga merupakan komunitas santri, yang mempunyai pengaruh terhadap desa disekitarnya.

Sistem perkawinan antara *pondok* satu dengan *pondok* lainnya, menciptakan hubungan kekerabatan antar *pondok pesantren*, dan secara luas adanya hubungan persaudaraan antara daerah-daerah pesantren.¹⁰ Dengan demikian, terjadilah hubungan yang erat antar desa-desa pesantren dengan agama Islam, pertalian darah, keilmuan, dan kemasyarakatan. Hal inilah yang menguatkan akar Islam di Jawa, dan sekaligus memelihara kepemimpinan ulama dengan segala otoritasnya.

Ulama kemudian menjadi pimpinan komunitas santri atau masyarakat Islam sebelum adanya kerajaan Islam di Jawa. Pesantren Giri dan Gunung Jati pada awal perkembangan Islam di Jawa, merupakan *pondok pesantren* yang besar dan memiliki pengaruh yang luas. Karena luasnya pengaruh kepemimpinan dan karisma yang kuat, dua pesantren itu menjadi panutan bagi beberapa pesantren di sekitarnya.

Giri, sebuah daerah *enclave* Muslim di wilayah Majapahit, merupakan pesantren yang kemudian berkembang menjadi semacam kerajaan kecil. Giri sebagai kerajaan kecil dipimpin oleh seorang ulama bernama R. Paku atau Sunan Giri. Kerajaan ini hanyalah suatu bentuk formal komunitas muslim: belum memiliki perangkat kerajaan yang komplet. Meskipun demikian, Giri memiliki otoritas karismatik terhadap daerah-daerah santri lainnya sehingga mendapat hak kepercayaan sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi*, yaitu memiliki hak untuk memutuskan dan mengikat masalah agama Islam, kenegaraan, dan segala urusan kaum muslimin.¹¹ Sunan Giri merupakan salah seorang yang diminta untuk

membuat keputusan mengenai keberadaan Demak, dan yang membantu untuk membentuk perangkat pemerintahan, dan keagamaan. Sunan Giri yang memiliki otoritas *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai pucuk pimpinan kaum Muslimin Jawa antara lain memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Mengesahkan dan memberi gelar sultan kepada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa.
- b. Menentukan garis besar politik pemerintahan.
- c. Ikut bertanggung jawab terhadap keamanan kaum Muslimin dan kerajaan-kerajaan Islam.
- d. Mencabut kedudukan sultan bila yang bersangkutan menyimpang dari kebijakan para Wali.¹²

Selain Demak, Sultan Hadiwijaya dari Pajang juga mengambil gelar sultan dari Sunan Giri.¹³ Selain itu, menurut catatan orang Belanda, Sunan Giri juga disebut dengan nama kehormatannya, yaitu *Panembahan Mas Giri*.¹⁴ Cornelis Speelman, menyebutkan pula gambaran ketinggian Sunan Giri di mata rakyatnya sebagai berikut:

“ ... omdat zij Mas Gierij ten respecte van zijne priesterlijke waardigheid an geprotendeerd heiligheid zeer aanhangen en in cerehouden. ”¹⁵

artinya :

“ ... karena Ia Mas Giri oleh para pengikutnya sangat dihormati karena dilindungi oleh nilai-nilai keulamaan yang melekat pada dirinya.”

Bahkan Gubernur Jendral J.P. Coen menyebut Sunan Giri dengan “*der Mohammetisten Paus*” atau Paus-nya orang Islam.¹⁶ Sunan Giri sebagai ulama memiliki otoritas politik kenegaraan, bahkan diangkat sebagai *sesepuh* dari kerajaan-kerajaan Jawa pada masanya. Kerajaan-kerajaan di Jawa sejak dari Demak sampai dengan Pajang, memberikan penghormatan dan menjunjung tinggi Sunan Giri, sebagai penguasa rohani di atasnya. Oleh karena itu, sebelum era Mataram Islam, boleh dikatakan peranan ulama

menempati posisi di atas kerajaan-kerajaan Islam. Dengan demikian, kontrol keagamaan dan politik ulama terhadap kerajaan-kerajaan cukup dominan sehingga dapat diharapkan kerajaan-kerajaan itu berjalan menurut kaidah agama.

GELAR BAGI ULAMA DI JAWA

Dalam masyarakat Jawa dikenal sebutan beberapa gelar yang diperuntukkan bagi ulama. Pertama, gelar *wali* diberikan pada ulama tingkat tinggi, memiliki pribadi yang berkemampuan luar biasa.¹⁷ Sering juga para wali dipanggil *sunan* (susuhunan = yang disuwuni), seperti halnya para raja. Hal ini berarti memiliki derajat seperti raja yang dapat memenuhi dan mengayomi kebutuhan masyarakat.

Kedua, gelar *panembahan* diberikan kepada ulama yang memiliki keunggulan *spiritual*. Di samping itu, gelar ini juga diberikan kepada ulama yang berusia tua atau *awune tuwa*. Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang ulama mempunyai kekuatan *spiritual* yang tinggi.¹⁸

Gelar ini pernah dipakai oleh keturunan Sunan Giri (abad ke-17) yaitu *Panembahan Mas Giri* dan juga *Panembahan Rama* atau Kyai Kajoran, seorang ulama Mataram keturunan P. Senopati. Gelar *Panembahan* itu juga dipakai oleh Senopati yang punya kekuatan *spiritual*, atau saudara raja yang telah tua. Arti dari *panembahan* ialah yang disembah atau dihormati, karena prestasi *spiritual*nya.

Ketiga, gelar *kyai*, seperti telah disebut di muka, gelar ini adalah gelar sebagai kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Di samping itu, gelar *kyai* digunakan untuk seorang ulama desa yang mempunyai pengaruh besar. Mereka sering disebut sebagai *kyai ageng* (ki ageng / ki gede). Ulama yang telah pergi haji disebut *kyai haji*, atau *kiaji*.

Dari penggelaran para alim-ulama itu, terlihat bahwa di Jawa terdapat penghormatan baik terhadap pemimpin agama, maupun bidang politik kenegaraan. Adapun ulama yang masuk dalam lingkaran birokrat tradisional, diberi gelar : *Penghulu*, *Ketib*, *Modin*, *Kaum*, *Abdi Dalem Kaji* dan sebagainya.

ULAMA DI KERAJAAN MATARAM

Pergeseran pusat kerajaan-kerajaan Islam Jawa dari *pesisiran* ke *pedalaman*, menimbulkan corak dan sifat yang berbeda. Kerajaan Islam Mataram yang di pedalaman lebih bersifat agraris, tertutup, sehingga wajar bila iklim senkretisme dan akulturasi dengan kejawaan lebih pekat.

Meskipun agama Islam masih diakui sebagai agama negara, telah terjadi pergeseran penghormatan terhadap otoritas ulama Giri sejak Mataram tidak mau menghormati Giri sebagai penguasa rohani di kerajaan Mataram. Hal ini terlihat pada raja Mataram pertama Senopati yang mengambil gelar *Panembahan* yang dipakai keturunan Sunan Giri. Dengan demikian, gelar *Panembahan Mas Giri* sebagai penghormatan *spiritual/rohaniah* diambil langsung oleh Senopati. Hal ini berarti bahwa Senopati telah memuliakan dirinya sebagai pemimpin *spiritual/rohaniah*.

Demikian juga halnya pada waktu Mataram diperintah oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, dengan dalih mempersatukan Jawa, Sultan Agung menganeksasi daerah timur termasuk Gresik, Giri, dan Surabaya. Penguasa daerah itu, termasuk Sunan Giri dijadikan bawahan Mataram sehingga tamatlah riwayat kedaulatan politik ulama Giri atas kerajaan-kerajaan Islam. Walaupun demikian kedaulatannya sebagai pemimpin agama masih dihormati.

Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung Hanyakrakusuma, melengkapi gelarnya dengan gelar *spiritual-keagamaan*, yaitu *Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawa*, yang artinya Hamba Yang Maha Pengasih, Tuan yang mengatur agama, wakil Tuhan di Tanah Jawa. Sejak saat itulah gelar kerohanian dan keagamaan dipegang langsung oleh raja yang berkuasa. Meskipun demikian, Sultan Agung tetap menghormati para ulama. Misalnya, ia menempatkan ulama pada jabatan terhormat sebagai anggota *Dewan Parampara* (penasihat tinggi kerajaan). Di samping itu, dalam struktur kerajaannya juga didirikan mahkamah agama Islam dan ulama mendapat tempat sebagai *abdi dalem* dalam urusan keagamaan yang dikepalai oleh

seorang *pengulu*. Sultan Agung juga memberikan tanah *perdikan* kepada kaum ulama atau kyai yang mengasuh *pondok pesantren*, dalam rangka pengembangan Islam di wilayah Mataram.

Pesantren-pesantren desa dikembangkan di daerah-daerah kabupaten. Di samping itu, oleh para ulama juga didirikan pesantren besar, pesantren *takhasus* (keahlian khusus) dan perguruan *tariqat*.¹⁹ Menurut perkiraan jumlah pesantren pada masa pemerintahan Sultan Agung berjumlah 300 pesantren.²⁰

Pada masa pemerintahan Sultan Agung hubungan raja dengan ulama berjalan harmonis. Sultan Agung menghormati ulama (para kyai) sebagai tokoh yang bermoral dan berilmu pengetahuan tinggi. Sebaliknya, kaum ulama menunjukkan loyalitasnya yang baik terhadap raja.²¹ Para ulama diangkat sebagai penasihat tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang politik pemerintahan dan militer. Pesantren-pesantren diizinkan mengadakan latihan beladiri (pencak), dan berlatih perang. Kegiatan ini dijadikan sebagai pertahanan rakyat yang akan digunakan untuk mobilisasi umum. Pada saat Sultan Agung membutuhkan prajurit perang yang banyak para ulama tampil memimpin kaum santri dan rakyat desa yang sudah terpilih untuk membantu kerajaan. Pada tahun 1924, Sultan Agung mengerahkan 30.000 tentara yang terdiri atas prajurit kraton dan *Wiratani* dengan 7.000 pendekar yang kebal.²² Pasukan *Wiratani* itu biasanya adalah hasil binaan kaum ulama pedesaan.

Hubungan harmonis antara kaum ulama dengan Sultan Agung, hal itu terjadi karena penguasa tidak menyimpang dari nilai-nilai Islami, dan justru mengembangkannya. Namun, apabila raja yang sedang memerintah menyimpang dari nilai-nilai Islami, hubungan itu akan retak.²³ Hal ini terjadi pada saat Mataram diperintah oleh Amangkurat I, setelah Sultan Agung wafat.

Oleh karena Amangkurat bersahabat dengan VOC (Belanda 1646), pengaruh sekulerisme masuk di dalam Kerajaan Mataram. Upacara dengan minuman keras dibudayakan di keraton, raja lebih menghargai orang Belanda dari pada Dewan Parampara. Raja berlaku otoriter sehingga mengakibat-

kan munculnya prahara di Mataram, yaitu Raja dikalahkan rakyat yang dipimpin oleh ulama (Kyai Kajoran) dan Trunojoyo.

Bercermin pada pengalaman ini, para penerus raja-raja Mataram mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun juga sebagai pewaris kerajaan Islam dan berdiri di atas rakyat yang beragama Islam mereka harus berjalan menurut kaidah Islam. Di samping itu kerajaan juga harus memberikan tempat kepada kaum ulama untuk melaksanakan upacara dan mengembangkan Islam di wilayahnya. Pendekatan antara raja dan ulama harus dipelihara baik dalam ketenteraman kerajaan dan rakyatnya. Oleh karena itu, tradisi kerajaan dengan struktur resmi menempatkan ulama sebagai anggota birokrasi merupakan keharusan bagi kerajaan-kerajaan pewaris Mataram Islam.

TIPOLOGI ULAMA JAWA

Dari pertumbuhan dan pengembangannya, ulama di Jawa dapat dikategorikan menjadi 4 tipe ulama,²⁴

Tipe yang *pertama*, adalah *golongan ulama yang merangkap sebagai penguasa pusat pemerintahan*. Termasuk golongan ini ialah Sunan Giri dengan keturunannya dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pemimpin agama itu mempunyai reputasi tinggi dalam bidang keagamaan, politik kenegaraan, dan otoritas sebagai pentahbis para sultan di Jawa sebelum Mataram.

Tipe yang *kedua*, adalah *golongan ulama yang masih berdarah bangsawan*. Hal ini dapat terjadi, karena sering para bangsawan ataupun raja mengawinkan puteranya dengan ulama, atau keluarga ulama. Ulama yang golongan kedua ini antara lain Ki Ageng Pandan Arang, Sayid Kalkum, dan Panembahan Rama atau Kyai Kajoran. Yang disebut terakhir ini (Kajoran) justru masih keturunan Panembahan Senopati, raja Mataram pertama (pendiri dinasti Mataram).²⁵

Tipe yang *ketiga*, adalah *golongan ulama sebagai alat birokrasi kerajaan/tradisional*. Ulama birokrat bertugas pada upacara keagamaan kraton, pernikahan keluarga raja, urusan tempat ibadah, dan makam. Di samping itu ulama kelompok ini juga ber-

peran sebagai pemberi fatwa tentang hukum-hukum agama. Ulama golongan ini sering disebut sebagai *Abdi Dalem Pamethakan*, *Abdi Dalem Kaji*, *Abdi Dalem Suronoto*, dan sebagainya. Mereka berada di bawah kepemimpinan *Penghulu Kraton*.

Tipe *keempat*, adalah *golongan ulama pedesaan* yang hidup di desa-desa dan tidak memiliki hubungan dengan birokrasi. Kaum ulama desa ini bekerja independen menurut kemauannya sendiri untuk mengembangkan agama Islam di daerahnya. Ulama desa ini lebih akrab dan dekat dengan rakyat. Oleh rakyat desanya, mereka dihormati sebagai elite religius dan tempat bertanya. Termasuk dalam Tipe ini juga kaum ulama pengembara, dan ulama yang menetap di daerah perdikan.

Dari keempat tipologi ulama diatas, dapat dilihat bahwa tipe pertama pada saat ini sudah tidak ada lagi, sedangkan tipe kedua dan keempat merupakan ulama yang di dalam sejarah lebih independen, dan berani menyampaikan secara tegas kebenaran Islam, meskipun harus bertentangan dengan penguasa. Ulama tipe ketiga, yaitu ulama birokrat, biasanya merupakan alat upacara kraton, hidupnya sangat bergantung pada *maisah* dari kraton. Oleh karena itu, lebih terikat pada penguasa.

Walaupun dapat digolongkan dalam tipe-tipe diatas, para ulama itu tidak menyendiri. Mereka sering berhubungan dengan yang lain terutama dalam masalah dakwah dan pengembangan agama. Dialog antarulama dari berbagai tipe ini dilakukan untuk saling mengisi kekurangan yang ada dalam memimpin umat. Adapun yang menyatukan mereka adalah mereka sama-sama masih merasa menjadi *Warosatul Anbiya'*, dengan segala konsekuensinya.

SIMPULAN

Nama "Ulama" merupakan jamak dari kata bahasa Arab "Alim", yang artinya orang berilmu atau ilmuwan. Setelah masuk dalam masyarakat Jawa, kata ulama mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sebagai ahli agama Islam sekaligus sebagai tokoh dan pemimpin keagamaan. Dalam perkembangan selanjut-

nya, ulama dijadikan sebagai tokoh yang memimpin politik, memimpin gerakan sosial, dan juga memimpin gerakan melawan penjajah. Dapat dikatakan pula ulama adalah *informal leaders* sebagai *key person* yang ditaati oleh masyarakat di lingkungan yang dipimpinnya.

Idealnya ulama itu berkarakter sebagai pewaris para nabi, yang tampil untuk mensosialisasikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, dengan mengedepankan penyampaian ajaran (*tablig*), kejujuran (*siddiq*), dapat dipercaya/bertanggung jawab (*amanah*), dan dengan kecerdasan (*fathanah*). Tingkah laku ulama akan membawa ketenteraman (*sakinah*), kesejahteraan di alam semesta (*rakhmat lil 'alamin*), kesejukan, dan kedamaian (*islah*), sehingga akan menjadi tumpuan hati umat. Namun, ulama tidak dapat se-sempurna nabi karena nabi di-*ma'shum*-kan (dijaga dari perbuatan tercela) oleh Allah SWT., sedangkan ulama adalah manusia biasa, yang dapat tergoda oleh gemerlapnya dunia. Oleh karena itu, terdapat pula istilah "*ulama 'usu'*" (ulama yang rusak) karena dikendalikan oleh hawa nafsunya sehingga kehilangan karakter keulamaannya.

Dalam perkembangan awal Islam di Jawa terdapat beberapa ulama yang mendapatkan julukan "*wali*", tugasnya menyebarkan dan mempertahankan Islam dengan menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini lebih cocok bagi masyarakat Jawa sehingga penyebaran dan pengembangan Islam di Jawa dapat berjalan cepat dan mengakar meskipun intensitas keislamannya bervariasi. Pada awalnya ulama di Jawa memiliki kedudukan yang tinggi, dan yang memberikan gelar serta sebagai penasihat bagi para raja di Jawa. Namun, semenjak Sultan Agung Hanyakrakusuma, kedudukan para ulama dijadikan pembantu raja dalam urusan keagamaan (semacam depertemen agama), dan masuk dalam dewan parampara (penasehat raja). Di samping para ulama yang ada di birokrasi, terdapat pula para ulama yang berada di pedesaan dengan aktivitas mengelola *pondok pesantren*, *madrasah*, serta menjadi guru

ngaji, tabib (pengobatan), dan pemimpin masyarakat. Walaupun para ulama itu berada di berbagai pos aktivitasnya, namun punya hubungan *silaturahmi* yang erat.

- 1 Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta : BPA-UGM, 1974), hlm. 16.
- 2 *Ibid*, hlm. 17.
- 3 Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*. Terjemahan Ali Audah (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 98 – 99.
- 4 Lihat tulisan Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics*.(Karachi : Ma'aref Ltd., 1972), hlm. 5 – 12.
- 5 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mendulang Faidah dari Lautan Ilmu*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 161.
- 6 Wiji Saksana, *Mengislamkan Tanah Jawa* (Jakarta : Mizan, 1996), hlm. 17 – 46.
- 7 *Titi Asri*, (Jakarta : Proyek Penerbitan Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Serta Daerah Dep. PTK, 1978), hlm. 21 – 25.
- 8 A. Adaby Darban, *Fragmenta Sejarah Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Irma, 1984), hlm. 5 – 6.
- 9 *Research Pertama Sejarah dan Da'wah Islamiyah Sunan Giri*, (Gresik : Lembaga Research Pesantren Luhur Islam, 1973), hlm. 135.
- 10 Zamakhsyari Dhofir. *Tradisi Pesantren*, (Jakarta : LP3ES, 1982), hlm. 62 – 70.
- 11 *Op. cit*.
- 12 *Ibid.*, hlm. 137-138.
- 13 *Ibid.*, hlm. 138; Lihat pula dalam Husein Djajadiningrat, *Cristische Beschouwing van de Sadjarah Banten*, Disertasi Leiden 1913, hlm. 100.
- 14 Husein Djajadiningrat, *ibid*.
- 15 J.K.J. de Jonge, *De Opkomst*, djilid VII (1873), hlm. 139-140.
- 16 *Ibid.*, hlm. 35.
- 17 F.A. Sutjipto, *Pemimpin2 Agama Di Wilayah Keradjaan Mataram Sekitar Abad 18*, 1971. Tulisan tidak diterbitkan.
- 18 Sutjipto, "Panembahan dalam Sistem Titular Tradisional", dalam *Buletin Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM*, No. 1, 1969, hlm. 80.
- 19 Sri Sutjiantiningsih dan Sutrisno Kuntoyo (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Proyek IDKD Dep. P & K, 1980/1981), hlm. 29.
- 20 Lihat dalam *Tijdschrift Bataviaasch Genootschap*, No. 31/Th. 1886, hlm. 518.
- 21 F.A. Sutjipto, "Pengaruh Ulama Dalam Bidang Politik Dan Militer Di Kerajaan Mataram" dalam *Bacaan Sejarah* No. 9. Maret 1980, hlm. 3.
- 22 B. Schriche, *Indonesia Sociological Studies*, II, (Bandung: W. van Hoeve Ltd, 1959) hlm. 131.
- 23 Ahmad Abady Darban: *Fragmenta*, *op. cit.*, hlm. 18.
- 24 F.A. Sutjipto, *Pemimpin2*, *op. cit.*, hlm. 19-24.
- 25 Lihat *Serat Candra Kanta*, dikutip dalam "Het Kadjoran Vraagstuk", dalam *Djawa*, djilid XX, 1940, hlm. 326-327.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Adaby Darban. 1984. *Fragmenta Sejarah Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Irma.
- 1940. "Het Kadjoran Vraagstuk". Artikel De Graaf. Majalah *Djawa*, djilid XX.
- Husein Djajadiningrat. 1913. *Cristische Beschouwing van de Sadjarah Banten*. Disertasi, Leiden.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 1998. *Mendulang Faidah dari Lautan Ilmu*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Ishtiaq Husain Qureshi. 1972. *Ulema in Politics*. Karachi: Ma'aref Ltd.

- Jonge, J.K.J. 1873. *de De Opkomst ...*, djilid VI.
- Muhammad Husain Haekal. 1992. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terjemahan Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- _____. 1973. *Research Pertama Sejarah dan Da'wah Islamiyah Sunan Giri*, Gresik: Lembaga Research Pesantren Luhur Islam.
- Sartono Kartodirdjo. 1974. *Kepemimpinan Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: BPA-UGM.
- Schriebe, B. 1959. *Indonesia Sociological Studies*, II, Bandung: W. van Hoeve Ltd.
- Si Sutjiantiningsih dan Sutrisno Kuntoyo. 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Proyek IIKD Dep. P & K.
- Sutjipto, F.A. 1969. "Penerbitan dalam Sistem Titular Tradisional". *Buletin Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM*, No. 1.
- _____. 1980. "Pengaruh Ulama Dalam Bidang Politik dan Militer di Kerajaan Mataran". *Bacaan Sejarah* No. 9. Maret 1980, hlm. 3.
- F.A. Sutjipto. 1980. "Pengaruh Ulama Dalam Bidang Politik dan Militer Di Kerajaan Mataran". *Bacaan Sejarah* No. 9. Maret 1980.
- _____. 1971. *Remimpin-pemimpin Agama Di Wilayah Keradjaan Mataran Sekitar Abad 18*. Tidak diterbitkan.
- _____. 1886. *Tijdschrift Bataviaasch Genootschap*, No. 31/Th 1886.
- Titi Asri. 1978. *Buku Bacaan dan Sastra Indonesia serta Daerah*. Jakarta : Proyek Penerbitan Buku Dep. P&K.
- Wiji Saksana. 1996. *Mengislamkan Tanah Jawa*. Jakarta : Mizan.
- Zanakhshyari Dhofir. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES.